

PENGARUH PENDUDUKAN JEPANG TERHADAP PERKEMBANGAN MILITER SUMATERA SELATAN TAHUN 1942-1947

Lailatul Munawaroh¹, Ira Miyarni Sustianingsih², Sarkowi³
Universitas PGRI Silampari^{1,2,3}
lailatul0130@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pengaruh pendudukan Jepang terhadap perkembangan militer di Sumatera Selatan tahun 1942-1947. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sejarah (historis). Langkah-langkah yang digunakan antara lain: Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi, dan *Historiography*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Sumatera Selatan dijadikan sebagai daerah inti oleh Jepang dalam bidang ekonomi. Selain itu, para pemuda dijadikan sebagai prajurit sukarela (*Gyugun*) oleh Jepang yang bertujuan untuk membantu balatentara Jepang dalam mempertahankan kawasan pendudukan dari serangan balasan Sekutu. Setelah pendudukan Jepang berakhir dan pergi dari Sumatera Selatan, para mantan prajurit sukarela (*Gyugun*) yang pernah dibentuk oleh Jepang menduduki posisi-posisi penting dalam masa perjuangan kemerdekaan, yang nantinya menjadi pelopor berdirinya BKR/TKR di Sumatera Selatan. Simpulan penelitian ini Jepang membentuk pusat pelatihan *Gyugun*, dengan diberikan doktrin dan latihan dengan model militer Jepang yang bersifat keras dalam segi fisik maupun mental agar menjadi prajurit *Bushido* untuk membantu melawan Jepang melawan sekutu.

Kata Kunci: Militer, Pendudukan Jepang, Pengaruh

ABSTRACT

This study aims to describe the influence of the Japanese occupation on military developments in South Sumatra in 1942-1947. The method used in this research is historical research (historical). The steps used include: Heuristics, Source Criticism, Interpretation, and Historiography. The results showed that during the Japanese occupation of Indonesia, South Sumatra was used as a core area by the Japanese in the economic field. In addition, the youths were made as volunteer soldiers (Gyugun) by the Japanese who aimed to assist the Japanese army in defending the occupied area from Allied counterattacks. After the Japanese occupation ended and left South Sumatra, the former volunteer soldiers (Gyugun) who had been formed by the Japanese occupied important positions during the struggle for independence, which later became the pioneers of the establishment of BKR/TKR in South Sumatra. The conclusion of this study is that Japan formed a Gyugun training center, by providing doctrine and training with a Japanese military model that was both physically and mentally tough in order to become a Bushido soldier to help fight Japan against its allies.

Keywords: Influence, Japanese Occupation, Military.

PENDAHULUAN

Jepang merupakan negara yang berada di Asia Timur. Sejak Kekaisaran Meiji tahun 1868 dan dimulainya hubungan dengan negara-negara Barat, Jepang melakukan modernisasi secara besar-besaran di segala bidang dan berkembang secara pesat. Pada tahun 1940, Jepang membuat kebijakan wilayah kemakmuran bersama Asia Timur Raya, yaitu sebuah kebijakan untuk mengurangi ketergantungan Jepang atas sumber daya alam yang diimpor dari negara-negara Barat namun mengganti persediaan sumber daya alam tersebut dengan cara menempatkan kekuasaan Jepang di wilayah jajahan Sekutu seperti Inggris, Amerika Serikat, maupun Belanda di Asia Tenggara.

Keberhasilan modernisasi Jepang setelah Restorasi Meiji membuat Jepang semakin maju dalam bidang pendidikan, ekonomi, pemerintahan, militer, sosial budaya dan lain sebagainya mengalami kemajuan yang pesat. Bangsa Jepang sadar, bahwa untuk mengimbangi bangsa Barat dan mempertahankan Jepang, maka harus menguasai ilmu dan teknologi bangsa Barat, baik di bidang militer, sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Keberhasilan Jepang pasca Restorasi Meiji membuat Jepang ingin bersaing dengan negara-negara Barat dalam segala hal, bahkan juga dalam mencari daerah kekuasaan (Rosidi, 1981).

Keadaan itu yang akhirnya membuat Jepang memutuskan untuk berperang melawan Sekutu dengan menyerang dan menghancurkan pangkalan besar militer angkatan laut milik Amerika Serikat di Pearl Harbour Kepulauan Hawaii pada tanggal 8 Desember 1941 Jepang

menyerang armada terkuat milik Amerika Serikat. Hal tersebut selaras dengan tujuan Jepang untuk membentuk lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya dan dampak dari semangat *Hakko Ichi u*. Pengertian dari *Hakko Ichi u* adalah delapan benang di bawah satu atap, yang memiliki makna pembentukan suatu lingkungan yang didominasi oleh Jepang yang meliputi bagian besar dunia. Maka dari itu Jepang ingin menguasai seluruh Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Poesponegoro, 1979). Dengan pecahnya Perang Asia Pasifik, Jepang kemudian bergerak untuk melakukan ekspansi wilayah bagian selatan yang disebut *ninshin-ron*, termasuk Sumatera Selatan yang kala itu sedang dijajah oleh Belanda.

Dalam gerakannya ke Selatan tersebut, Jepang juga menyerbu ke Indonesia yang ketika itu sedang dikuasai oleh Belanda. Demikian juga ketika Jepang masuk ke Indonesia, kekuatan pasukan militer Jepang lah yang telah berhasil mengusir Sekutu dari Indonesia. Jepang mulai menduduki Indonesia di wilayah Sumatera di bawah pengendalian Departemen Pemerintahan Militer (Gunseibu) Tentara ke-25, wilayah tersebut dianggap penting bagi Jepang.

Zed (2004) menyatakan bahwa: Pertama, kedudukan geografisnya yang strategis dalam usaha Jepang mendepak dominasi barat di kawasan selatan. Kawasan ini terletak di lintasan hubungan Timur-Barat selama berabad-abad dan kini Jepang harus memutuskan hubungan-hubungan itu, termasuk hubungan Sumatra dengan Jawa, guna mengaburkan citra nasionalisme Indonesia yang telah terbentuk jauh sebelumnya. Kedua, erat kaitannya

dengan ini, dari sudut strategi militer Jepang pada masa PD (Perang Dunia) II, ancaman serangan musuh (sekutu) yang paling rawan diperkirakan akan muncul dari arah barat (Ceylon, kini SriLangka). Tumpuan pertahanan tentara pendudukan, karenanya, harus terletak di seputar Sumatera dan Selat Malaka. Dengan sendirinya Sumatera dan Semenanjung Malaya menjadi vital. Selain itu, wilayah Sumatra juga kaya akan sumber daya alam yang dibutuhkan dalam perang. Ketiga, Sumatra memiliki sumber alam yang kaya, yang diperlukan Jepang untuk ekonomi perangnya pada masa PD II (1939-1945). Terutama bahan bakar minyak, timah dan karet yang diperlukan untuk industri perang di dalam negerinya, disamping untuk mobilitas mesin perang di daerah pendudukan.

Penelitian yang dilakukan (Arma, 2019) yang berjudul “Palembang Shi pada Masa Pemerintahan Militer Jepang Tahun 1942-1945”. Penelitian tersebut merekonstruksi tentang perkembangan militer mengenai proses terbentuknya pemerintahan Palembang *shi* oleh pemerintah militer Jepang, struktur pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan tersebut.

Penelitian yang dilakukan (Utami, 2013) berupa Skripsi yang berjudul “Pengaruh Unsur Karakter Kemiliteran Jepang Terhadap Giyugun Di Sumatera Tahun 1942-1945 Dan Dampaknya Terhadap Pembentukan BKR/TKR Tahun 1945-1950”. Yang merekonstruksi tentang gambaran pengaruh militer Jepang ketika berada di Indonesia terhadap pembentukan watak dan karakter pemuda Indonesia. Pembentukan tentara sukarela tersebut telah merubah watak dan karakter pemuda

Sumatera dalam segi militer, pemuda Sumatera yang pada awalnya tidak pernah merasakan pendidikan militer. Setelah Jepang pergi dari Indonesia, para mantan prajurit sukarela yang pernah dibentuk oleh Jepang tersebut menduduki posisi-posisi penting dalam masa perjuangan kemerdekaan. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin dalam suatu tentara kesatuan nasional yang memperjuangkan cita-cita bangsa dengan bekal dan kemampuan militer yang mereka dapat dari Jepang.

Sumatera Selatan memiliki wilayah kedudukan khusus dalam strategi militer Jepang di Pulau Sumatera, terlihat Palembang menjadi daerah pertama yang dituju Jepang di Pulau Sumatera. Wilayah ini sejak semula diperhitungkan oleh pasukan tentara Jepang sebagai pintu masuk bagi rencana penyerbuan Jepang di Indonesia. Alasannya karena sebagian besar bahan vital yang diperlukan Jepang, seperti minyak, batubara, timah, dan bahan mentah karet terdapat di daerah ini. Namun yang tak kalah penting adalah Jepang punya kepentingan khusus atas daerah ini, yakni dengan didudukinya Palembang terlebih dahulu maka Jepang bisa memotong garis Jawa dan sekaligus memblokir aliran pengungsi yang mundur dari Sumatera dan Singapura ke Jawa (Hanafiah, 1998).

Jepang memasuki wilayah Sumatera Selatan pada tanggal 14 Februari 1942. Sepak terjang yang dilakukan Jepang di Palembang tidak memperoleh perlawanan yang berarti dari pihak Sekutu karena serangan Jepang begitu membabi buta serta banyaknya pasukan dan pesawat terbang Jepang yang mengepung pasukan Sekutu di Palembang. Begitu juga dengan rakyat Palembang yang memang menyambut baik kedatangan

Jepang karena diharapkan Jepang dapat menjadi liberator yang akan membebaskan mereka dari dominasi kolonial Belanda. Akhirnya pada tanggal 16 Februari 1942 Palembang dan sekitarnya jatuh ke tangan Jepang.

Pembentukan tentara sukarela tersebut telah merubah watak dan karakter pemuda Sumatera dalam segi militer, pemuda Sumatera yang pada awalnya tidak pernah merasakan pendidikan militer kemudian menjadikan hal tersebut sebagai bekal dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia setelah pendudukan Jepang berakhir. Setelah Jepang pergi dari Indonesia, para mantan prajurit sukarela yang pernah dibentuk oleh Jepang tersebut menduduki posisi-posisi penting sebagai perwira yang diberi pangkat Sersan Mayor dan sebagian diberi pangkat Sersan dalam masa perjuangan kemerdekaan. Contohnya Bambang Utoyo yang pernah menjabat Komandan Divisi di Palembang pada tahun 1947-1948. Para anggota *Ex Gyugun* menjadi pemimpin dalam suatu tentara kesatuan nasional yang memperjuangkan cita-cita bangsa dengan bekal dan kemampuan militer yang mereka dapat dari Jepang.

Pentingnya militer dalam setiap negara juga dirasakan oleh negara Indonesia dalam usahanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Untuk dapat mencapai kemerdekaan tersebut tentu saja memerlukan kekuatan militer agar dapat melawan Sekutu yang sedang menjajah Indonesia. Tetapi, ketika itu rakyat Indonesia belum memiliki bekal militer yang cukup besar dan kuat dalam usaha perjuangannya. Sejak negara Indonesia dijajah oleh Sekutu, rakyat tidak pernah diberikan

kesempatan untuk mendapat pendidikan militer yang layak dan nantinya digunakan sebagai bekal perjuangan kemerdekaan, rakyat Indonesia hanya diperbudak saja oleh Sekutu. Pada masa pendudukan Jepang inilah para pemuda mendapatkan pendidikan militer atau latihan kemiliteran sehingga momentum ini dimanfaatkan oleh *Ex Gyugun* untuk pembentukan kemiliteran yang merupakan suatu faktor yang penting dalam Sejarah nasional Indonesia karena telah mempercepat proses kemerdekaan Indonesia dan mempertaham kemerdekaan Indonesia.

Di Sumatera Selatan dibentuk lah organisasi militer yang diberi nama *Gyugun* pada 15 Oktober 1943. *Gyugun* merupakan salah satu bentuk lembaga perjuangan yang secara fisik memperjuangkan usaha pertahanan negara. *Gyugun* yang ada di Sumatera sama dengan organisasi PETA yang ada di pulau Jawa hanya berbeda nama saja yang mempunyai arti yang sama yaitu tentara sukarela. *Gyugun* bukanlah alat jepang, tetapi dengan fasilitas yang dimiliki Jepang dimanfaatkan sepenuhnya untuk persiapan kemerdekaan Indonesia (Ratuperwiranegara, 1987).

Pusat pelatihan *Gyugun* Sumatera bagian selatan berada di tiga tempat: Pagar Alam, Karang Dalo, dan Palembang. Ketiganya didirikan oleh Brigade Gabungan (Mixed Brigade) Tentara Angkatan Darat ke-26 yang bermarkas di Lahat. Pemuda berasal dari lima keresidenan yang terdapat di Sumatera bagian selatan: Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka-Belitung.

Tokoh dibentuklah *Gyugun* Palembang yang memegang peranan penting yaitu Hasan Kasim, Rivai, Zainal Abidin Ning, Muh. Nuh, P.

Hutagalung, Moh. Arif, dan Efendi, daerah Lampung Pangeran Emir Mohammad Noor, Jambi Abunjani, Bengkulu Nawawi Manaf, Zen Rani, Hadis Lani, Syafei, Ibrahim dan Zahri Tani, Kepulauan Bangka-Belitung F. Manusama (Ratuperwiranegara, 1987).

Penelitian ini perlu dilakukan karena dari studi Manu sama kasus pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa masih sedikit peneliti terdahulu yang mengkaji tentang perkembangan militer di Sumatera Selatan tahun 1942-1947 secara spesifik. Oleh karena itu, peneliti ingin mendeskripsikan secara jelas mengenai Pengaruh Pendudukan Jepang Terhadap Perkembangan Militer di Sumatera Selatan Tahun 1942-1947.

Pengaruh pendudukan Jepang terhadap perkembangan militer di Sumatera Selatan memiliki peranan yang cukup besar dalam menambah semangat atau keinginan untuk persiapan kemerdekaan. Selain itu untuk mengetahui ilmu perang dan teknik penggunaan senjata oleh sebab itu para pemuda mengikuti pendidikan kemiliteran Jepang. Khususnya *Gyugun* yang merupakan prajurit tanpa seragam pada awal proklamasi menjadi pertahanan Sumatera Selatan dalam menghadapi militer Jepang dan sekaligus menjadi cikal bakal Badan Keamanan Rakyat (BKR) Sumatera Selatan yang merupakan perwujudan usaha yang penting untuk mempertahankan kemerdekaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah (historis) dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya adalah untuk merekonstruksi masa lampau secara

sistematis dan objektif dengan menggunakan tahapan yang dimulai dari: tahapan *Heuristik*, *Kritik*, *interpretasi*, dan *historiography*.

Pertama tahap *Heuristik*, yaitu tahapan menemukan dan menghimpun sumber, informasi, jejak masa lampau, menggunakan sumber sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan yang bersumber dari koleksi buku pribadi, jurnal dan juga dari perpustakaan Universitas PGRI Silampari.

Kedua tahap *Kritik*, yaitu kegiatan meneliti sumber, informasi, jejak tersebut secara kritik yang terdiri atas kritik eksternal dan kritik internal. Pertama Tahapan Kritik Eksternal, yaitu: (1) Apakah sumber tersebut memang dikehendaki oleh peneliti, dan sesuai dengan tema penelitian yang diambil; (2) Apakah sumber itu asli atau tiruan; (3) Sumber tersebut utuh atau telah mengalami perubahan, atau dikenal juga sebagai kritik teks, dengan melihat apakah isi sumber tersebut mengalami pengurangan ataupun penambahan dari isi sumber asli, antara lain buku edisi revisi. Kedua Tahapan Kritik Intern, untuk mengetahui data tersebut kredibel atau tidak, peneliti mengklasifikasikan sumber dalam dua bagian, yaitu: (1) Buku-buku yang menjelaskan tentang pengaruh pendudukan Jepang di Sumatera Selatan tahun 1942-1947. (2) Buku-buku yang kajian umumnya tentang Perkembangan Militer di Sumatera Selatan tahun 1942-1947. Selanjutnya kedua klasifikasi sumber tersebut dikombinasikan dan diambil kesimpulan agar mempermudah analisa tentang pengaruh pendudukan Jepang terhadap perkembangan militer di Sumatera Selatan tahun 1942-1947.

Ketiga tahap *Interpretasi*, yaitu kegiatan menafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna dan saling hubungan daripada fakta-fakta yang diperoleh. Adapun langkah-langkah interpretasi pada tahap analisis, menguraikan tentang pengaruh pendudukan Jepang terhadap perkembangan militer di Sumatera Selatan tahun 1942-1947. Lalu pada tahap sintesis, uraian-uraian fakta tersebut dilakukan upaya penyatuan lalu diambil sebuah kesimpulan, seperti uraian pengaruh pendudukan Jepang di Sumatera Selatan tahun 1942-1947 dalam perkembangan militer di Sumatera Selatan tahun 1942-1947 yang diperoleh dari berbagai sumber buku yang dikombinasikan sehingga menjadi satu kesatuan untuk diambil sebuah kesimpulan yang struktural. Pada proses analisis ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar sumber yang diperoleh dapat memberikan informasi secara khusus dan bermakna.

Keempat tahap *Historiography*, yaitu kegiatan menyampaikan hasil rekonstruksi imajinatif masa lampau itu sesuai dengan jejak-jejaknya. Dengan perkataan lain tahap historiography itu ialah tahapan kegiatan penulisan. Hasil penafsiran atas fakta-fakta itu kita tuliskan menjadi suatu kisah sejarah yang selaras.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Pembentukan Kemiliteran Jepang di Sumatera Selatan 1942-1947

Militer merupakan alat utama negara dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara, terlebih dalam kondisi perang. Peran militer Jepang

sebagai sebuah organisasi sangat berpengaruh dalam setiap kebijakan perang yang diambil oleh pemerintah Jepang. Setelah Jepang berhasil melaksanakan tujuan utamanya mengusir kekuasaan pemerintah Hindia Belanda dari Indonesia, Jepang mulai menanamkan kekuasaannya di Indonesia dengan membentuk pemerintahan militer diseluruh Indonesia (Mita, 2019).

Awal Kedatangan Jepang di Sumatera Selatan

Jepang memasuki Palembang pada tanggal 14 Februari 1942. Sebanyak 700 pasukan payung diterjunkan dari udara. Berselang waktu sehari setelah Jepang mengirimkan pasukan udaranya, Jepang juga mengirimkan pasukan angkatan laut (Kaigun) agar dapat masuk ke wilayah kota Palembang menggunakan jalur sungai Musi. Kekuatan Belanda yang kurang lebih satu batalion di Palembang dan sekitarnya tidak mampu menghambat gerak laju pasukan Jepang. Setelah menguasai Palembang dengan mudah, balatentara Jepang segera menuju Plaju, Sungai Gerong, dan landasan terbang Talang Betutu, Lahat Bengkulen dan Seluruh Sumatera Selatan. Wilayah Palembang pada periode pemerintahan pendudukan militer Jepang menempati posisi yang istimewa dalam strategi politik militer Jepang di Sumatera yang dianggap sebagai daerah inti (*nuclear zone*), artinya wilayah tersebut ditempatkan sebagai prioritas dalam rencana invasi Jepang di Kawasan Selatan. Di samping letaknya yang sangat strategis bagi kepentingan politik regional Jepang di Asia Tenggara, Palembang juga memiliki kekayaan sumber daya serta tenaga manusia yang dapat mendukung kepentingan

Jepang dalam Perang Asia Pasifik (Zed, 2003).

Pembentukan Pemerintahan Militer Jepang di Sumatera Selatan

Dengan masuknya tentara Jepang ke kota Palembang maka hal ini berdampak pula pada struktur birokrasi pemerintahan di kota Palembang yang sebelumnya dalam penguasaan pemerintah kolonial Belanda, Palembang ditetapkan sebagai sebuah wilayah otonom yang dikenal dengan istilah *Gameente* yang berlaku sejak tahun 1906 sampai dengan tahun 1942, hal ini menandakan bahwa kota Palembang telah di perbolehkan untuk mengelola daerahnya sendiri dengan di kepalai oleh seorang wali kota dan ketika berada di bawah penguasaan pemerintah Jepang, Palembang berubah menjadi sebuah wilayah otonom yang difungsikan sebagai daerah perekonomian sekaligus daerah militer yang disebut dengan istilah *Palembang Shi* (Wali kota) (Mita, 2019).

Palembang Shi pada dasarnya adalah kelanjutan dari *Stadsgemeente* dengan *Burgemeesternya* namun terdapat beberapa perbedaan antara *Gameente* dan *Palembang Shi*, Perbedaan itu adalah pada masa pemerintahan Hindia Belanda *Burgemeeste* hanyalah bagian dari *Standsgemeete*, sehingga kedudukannya tidak dualistis.

Pengaruh Gyugun di Sumatera Selatan

Sumatera Selatan pada masa pendudukan Belanda tidak pernah mendapatkan pendidikan militer. Hanya pada zaman kolonial pemerintah Belanda menyediakan sekolah yang beraneka ragam bagi orang Indonesia untuk memenuhi

kebutuhan berbagai lapisan masyarakat. Di Sumatera kolonial Belanda memilih untuk tidak melakukan kontak langsung dengan penduduk, tetapi mempergunakan mediasi para penguasa lokal pribumi (Nasution, 2011).

Mobilisasi dilakukan dengan memberikan pendidikan dan latihan semi militer dan militer dengan tujuan menyiapkan tenaga cadangan bagi kepentingan perang Jepang dalam menghadapi sekutu. Program pendidikan militer yang dijalankan Jepang berlandaskan dua asumsi dasar. Pertama adalah semangat (*Sishin*) yang merupakan hal penting pada persenjataan militer, dan kedua adalah disiplin mutlak yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai (Lebra, 1998).

Pihak Jepang pada bulan Maret 1943 berusaha membentuk satuan militer pribumi secara penuh, yaitu satuan militer yang dipimpin sendiri oleh orang-orang pribumi. Pembentukan satuan militer pribumi itu diutamakan di daerah-daerah yang ditinggalkan oleh sebagian besar tentara Jepang untuk mempertahankan wilayah timur Indonesia. Satuan pribumi itu dibentuk karena situasi Perang Pasifik menjadi semakin gawat. Tentara sekutu telah mulai melancarkan serangan balasannya dan menahan gerak maju tentara Jepang. Dengan demikian kekhawatiran bahwa tentara sekutu akan menyerbu Indonesia. Selain itu, Jepang tidak mungkin lagi memperbesar jumlah tentaranya dengan orang-orang Jepang. Tentara Jepang tinggal beberapa brigade, yang prajuritnya sudah tua-tua (Ratuperwiranegara, 1987).

Di Sumatera Selatan dibentuk lah organisasi militer yang diberi nama *Gyugun*. *Gyugun* merupakan salah satu bentuk lembaga perjuangan yang secara fisik memperjuangkan usaha pertahanan negara. Tempat pendidikan *Gyugun* di Sumatera Selatan yaitu di Pagaralam. Kota Pagaralam dijadikan markas yang mengendalikan serta mengawasi kegiatan *Gyugun* secara keseluruhan. Pimpinan Markas Besar *Gyugun* di Pagaralam dijabat oleh seorang perwira Jepang, yaitu Kapten Kawaida.

Budaya Militer Jepang dalam Pembentukan Karakter Prajurit *Gyugun* di Sumatera Selatan 1942-1947

Setelah lulus tes, seluruh calon anggota *Gyugun* segera dibawa ke tempat pendidikan di Pagaralam. Setelah tiba di Pagaralam, para calon anggota itu dikumpulkan dan diberi penjelasan antara lain, mengenai peraturan, tata tertib, dan disiplin selama mengikuti pendidikan. Setelah itu, mereka diberi perlengkapan untuk pendidikan dan latihan, yang meliputi pakaian belacu (dicelup hijau), kaos kaki, sepatu, ikat pinggang, celana pendek, bantal kecil dan kelambu, tutup kepala, ransel, dan tempat minum, yang jenisnya sama dengan perlengkapan tentara Jepang, tetapi kualitasnya berbeda. Perlengkapan untuk perwira ditambah dengan pedang panjang untuk membedakan tingkatan antara prajurit bawahan dan perwira (Tim penyusun sejarah perjuangan Subkoss, 2003).

Perwira *Gyugun* yang didik dan dilatih di kamp-kamp militer Jepang serta ditugaskan disepanjang garis pantai dan daerah pedalaman Sumatera adalah orang-orang yang kali pertama mengenyam kehidupan

militer. Gemblengan keras militer Jepang yang berdisiplin tinggi tentunya sangat mempengaruhi watak mereka, dan sedikit banyak membentuk *weltanschauung* militer. *Weltanschauung* militer dapat didefinisikan sebagai pandangan hidup khas kaum militer. Beberapa atribut penting dari pandangan hidup seperti keberanian, disiplin dan *coercive action*, yaitu tindakan pengendalian dengan aksi kekerasan dan proteksi disertai dengan profesionalitas dan eksklusivisme

Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) Sumatera Selatan

Keikutsertaan pemuda dalam *Gyugun* juga dimotivasi oleh perkembangan situasi dan kondisi pada saat itu. Kekalahan Jepang dan menyerahnya pada Sekutu diikuti dengan perintah agar Jepang mempertahankan status *quo*, tidak akan merubah pemerintahan dan sebagainya. Pimpinan tertinggi Jepang mengambil langkah membubarkan *Gyugun* serta melucuti semua persenjataannya. Panglima Tentara ke 25 segera bertindak sesuai arahan atasannya. Pada tanggal 22 Agustus 1945 Panglima Tentara ke-25 juga menyatakan pembubaran *Gyugun* sesuai dengan ketentuan yang ada (Ratuperwiranegara, 1987).

Peranan bekas *Gyugun* adalah mendukung dan mengamankan proses perundingan. Setelah para bekas *Gyugun* menyadari pentingnya badan keamanan milik pemerintah RI, maka mereka berkumpul di masing-masing daerah guna menyusun organisasi yang bertugas menjaga keamanan. Organisasi tersebut berdiri sendiri-sendiri per daerah dan dibentuk dengan spontan. Barulah sesudah ada maklumat resmi dari pemerintah, beberapa waktu kemudian badan

organisasi keamanan tadi berubah menjadi Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang hampir semuanya menggunakan bekas *Gyugun* sebagai tenaga inti. Para pemuda dengan inti bekas *Gyugun* dapat melakukan konsolidasi secara penuh dan meningkatkan kemampuan kemiliteran untuk menjaga kemerdekaan dari ancaman fisik Sekutu. Diantara konsolidasi itu berupa penyusunan organisasi dan peningkatan latihan atau pendidikan kemiliteran (Utami, 2013).

Dampak semangat dari *Gyugun* di Sumatera Selatan tahun 1942-1947 dalam pembentukan BKR dari kehidupan militernya. BKR merupakan organisasi militer yang dibentuk sendiri oleh pemuda Indonesia. Prajuritnya berasal dari mantan opsir *Giyugun*. Dalam segi bentuk susunan persenjataan, kekuatan, peralatan maupun dalam pimpinannya berbeda dengan *Gyugun* yang dibentuk oleh Jepang. *Gyugun* berusaha untuk mengajarkan kepada anggotanya mengenai penyerangan pasukan secara gerilya, dan juga menanamkan semangat yang tinggi dalam membela negara, sehingga semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi telah menjadi watak dan karakter pemuda Indonesia hingga mencapai kemerdekaan.

PEMBAHASAN

Di Indonesia Jepang mempunyai tiga pemerintahan militer pendudukan yaitu: (1). Pemerintah Militer Angkatan Darat (Tentara Ke-16) untuk Pulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta; (2). Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Ke-25) untuk wilayah Pulau Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi; (3). Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan Ke-2) untuk daerah

yang meliputi Pulau Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusatnya di Makasar (Zed, 2005).

Keterlibatan Jepang dalam Perang Asia Pasifik merupakan sebuah awal Jepang menguasai wilayah Indonesia. Keterlibatan militer Jepang pada Perang Asia Pasifik dimulai ketika Jepang menyerang dan menghancurkan pangkalan militer milik Amerika Serikat yang berada di Pearl Harbor. Kota Palembang merupakan wilayah pertama di Sumatera yang berhasil dikuasai oleh militer Jepang pada tanggal 14 Februari 1942 menjadi pintu gerbang untuk menguasai seluruh wilayah Sumatera (Cici, 2017).

Sumatera Selatan merupakan daerah yang sangat penting, sumber kekayaan alam dan tambang yang sangat vital dan dibutuhkan oleh Jepang. Juga Sumatera Selatan merupakan daerah strategis dan mampu dijadikan basis pertahanan Jepang. Sebagian besar kebutuhan vital tersebut minyak bumi, batu bara, timah, dan karet dipasok oleh Sumatera. Untuk minyak bumi khususnya, karena hampir semua instalasi di tempat lain tidak berfungsi dengan baik karena telah dibumihanguskan Belanda, Jepang mengandalkan produksi minyak bumi daerah Palembang dan sekitarnya. Sekitar 82% minyak bumi berasal dari Plaju (Sumatera Selatan) atau sekitar 9 juta barel dari 11 barel untuk kebutuhan operasi militer Jepang di Indonesia, belum termasuk minyak bumi yang di ekspor ke Jepang (Ratuperwiranegara, 1987).

Menguasai Palembang berarti dapat memblokir kemungkinan datangnya bantuan musuh (sekutu) dari Jawa sekaligus mempersempit ruang gerak pasukan sekutu yang

ditarik mundur dari Sumatera dan Singapura ke Jawa. Baik dari segi strategi militer maupun ekonomi, Palembang berada pada urutan pertama dalam cetak biru invasi Jepang ke Sumatera. Tujuan pendudukan militer Jepang lama-kelamaan menjadi penindasan. *Romusha* atau kerja paksa untuk Palembang dikenal dengan nama Badan Pembantu Pemerintah (BPP).

Dengan menggunakan tangan pamong-pamong pemerintah Jepang telah merekrut tenaga-tenaga pekerja dari dusun dan kota dengan alasan untuk membantu memenangkan perang melawan Belanda dan Amerika Serikat. Dengan gencarnya gerakan menjaring pemuda-pemuda itu dilakukan oleh kaki tangan Jepang, sehingga BPP menjadi momok bagi masyarakat. Banyak yang melarikan diri ke hutan atau menghilang. Bahkan tokoh-tokoh pemerintah yang memegang peranan dalam gerakan pengumpulan tenaga kerja sangat dibenci. Pelarian yang dianggap merupakan pilihan yang baik, yaitu mendaftarkan diri menjadi anggota *Gyugun*. Paling tidak dapat memegang senjata dan tidak akan mati kelaparan ditengah-tengah kerja paksa.

Keikutsertaan para pemuda dalam *Gyugun* tidak terlepas dari peran keluarga dan ulama. Pihak keluarga memberikan dukungan dan izin kepada mereka untuk mengikuti pendidikan militer. Keluarga yang anaknya menjadi anggota *Gyugun* merasa bangga dan gembira. Keikutsertaan anaknya sebagai siswa *Gyugun* merupakan usaha untuk memperbaiki kesejahteraan hidup mereka selama mengikuti pendidikan militer anaknya menerima uang saku sebesar Rp. 20,00 satuan yang cukup besar dan sangat menggiurkan pada

waktu itu (Tim Penyusun Sejarah Perjuangan Subkoss, 2003). Fatwa dari kalangan ulama bahwa mati dalam membela tanah air adalah mati syahid memberikan motivasi kepada para Pemuda untuk masuk *Gyugun*, yang merupakan salah satu alternatif yang lebih terhormat menjadi *Romusha* (Ratuperwiranegara, 1987).

Daerah Sumatera merupakan daerah yang sangat berarti bagi pemerintahan militer Jepang hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Zed (2005) yang mengatakan bahwa wilayah Sumatera dan Semenanjung Malaya merupakan daerah inti di kawasan selatan, dan apabila Jepang mundur di wilayah Sumatera maka Jepang kehilangan kesempatan untuk dapat menaklukkan Hindia Belanda. Sumatera begitu penting bagi pemerintah militer Jepang karena wilayah Sumatera merupakan wilayah yang sangat strategis terletak di antara jalur silang pertemuan kawasan timur dan barat di Asia Tenggara.

Palembang Secara resmi ditetapkan sebagai *Palembang Shi* pada tanggal 23 Maret 1942 bersamaan dengan Pelantikan *Shi-co* yang pertama yakni *Syucia* dan Sekretaris *Shi-Co* Ir. Ibrahim Zahir (Hanafiah, 2001). Undang-Undang lainnya yang memperkuat status kota Palembang menjadi sebuah wilayah *Palembang Shi* pada masa pemerintahan militer Jepang juga tertuang dalam *Osamu Seirei* no. 12 tahun 1943 tentang wilayah *Ken* dan *Shi* yang termuat dalam *Kan Po* (Berita Pemerintah) No. 18 tanggal 29 bulan April. Keputusan yang dikeluarkan oleh tentara angkatan darat ke 25 ini juga berbarengan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh tentara angkatan darat ke 16 di Jawa yang berpusat di Jakarta,

bedanya adalah jika di Sumatera terbagi menjadi 10 keresidenan maka di Jawa terbagi menjadi 17 keresidenan, adapun dasar hukum dari keputusan ini adalah berdasarkan pada Undang-Undang No. 27 tahun 1942 tentang perubahan tata pemerintahan daerah (Pesponegoro, 2011).

Untuk kota Palembang pada masa pemerintahan Hindia Belanda pernah menjadi sebuah wilayah kota praja yang disebut dengan istilah *Gameente* dan ditetapkan berdasarkan *staatsblad* no 126 tanggal 1 April tahun 1906 maka dari itulah akhirnya pada masa pemerintah militer Jepang Palembang ditetapkan menjadi *Palembang Shi* dan tinggal meneruskan birokrasi yang ada sebelum akhirnya mengalami perkembangan lebih lanjut (Mita, 2019).

Pada masa pendudukan pemerintahan militer Jepang yang sangat singkat, yang hanya berusia kurang lebih 3,5 tahun lamanya pemerintah militer Jepang tidak terlalu banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah militer Jepang selalu berkaitan dengan kegiatan militer, baik kebijakan dibidang ekonomi, pendidikan, pembangunan infrastruktur dan kebijakan-kebijakan lainnya.

Di dalam kebijakan militer yang dilakukan pemerintah militer Jepang adalah membentuk suatu organisasi militer yakni *Gyugun* yang diharapkan anggotanya kelak mampu membantu pemerintah jepang menghadapi ancaman musuh. Pemerintah Jepang mulai merekrut anggota *Gyugun* pada akhir September 1943 dan hampir bersamaan dengan pembukaan pusat pelatihan PETA di Jawa.

Pembentukan *Gyugun* Palembang sendiri diikuti oleh hampir 300 orang pemuda dan masing-masing dari mereka ada yang ditempatkan di pusat latihan *Gyugun* di Lahat dan ada juga yang ditempatkan di pusat latihan *Gyugun* di Talang Betutu (Said, 1992).

Sementara itu Yusuf (2003) mengatakan bahwa terdapat 2 jenis *Gyugun* yang ada di Sumatera Selatan diantaranya yakni *Gyugun* darat (*Gyugun Kanbu*) dan *Gyugun* Udara di mana untuk pusat pelatihan *Gyugun* darat berada di daerah Pagaralam, Pagaralam sendiri terpilih sebagai pusat latihan *Gyugun Kanbu* karena disebabkan oleh letak geografis wilayahnya yang berada di daerah dataran tinggi sehingga memiliki hawa yang sejuk dan daerah yang subur dengan demikian pemerintah militer Jepang tidak perlu khawatir lagi dengan ketakutan-ketakutan akan kekurangan bahan makanan sementara itu pusat pelatihan *Gyugun* udara berada di daerah Talang Betutu, jumlah siswa yang mengikuti pendidikan *Gyugun* udara sangatlah terbatas jumlahnya dan adapun tugas dari *Gyugun* udara ini adalah untuk pengamanan kawasan lapangan terbang.

Pembentukan *Gyugun* oleh pemerintahan pendudukan Jepang mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat Sumatera Selatan. Para pemuda daerah banyak yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota *Gyugun* menurut M. Nuh, seorang pemuda pejuang, ketertarikan mereka masuk *Gyugun* didorong oleh adanya ajaran yang dikemukakan oleh Wedana Muara Enim Abdul Rozak dan tokoh masyarakat yang berjabatan sebagai kepala PU (Pekerjaan Umum) di Lahat, yaitu Bay Salim. Kedua tokoh ini berkeyakinan bahwa bangsa

Indonesia pasti merdeka dan dengan gigih menganjurkan agar para pemuda masuk *Gyugun*. Apabila Indonesia merdeka, mereka inilah yang akan menjadi Tentara Nasional, yang akan membela dan mempertahankan kemerdekaan itu (Wawancara, Jacob Chaidir, 9 Juli 2022, dalam buku Sejarah dan Peranan Subkoss).

Berdasarkan gagasan diatas Jepang sudah tidak mungkin memenangkan perang melawan sekutu. Satu-satunya pilihan adalah strategi defensif, yang memerlukan dukungan penuh dari rakyat setempat. Untuk mendorong rakyat supaya memberikan dukungan penuh kepada Jepang, mereka harus dilibatkan secara langsung dalam perang. Dengan begitu, rakyat merasa bahwa perang pasifik adalah perang mereka juga. Mereka harus mempertahankan negerinya guna mencegah masuknya kembali kaum penjajah dari Barat. Rakyat tidak akan mempunyai perasaan seperti itu apabila mereka tidak mempunyai tentara sendiri.

Pusat pelatihan *Gyugun* Sumatera bagian selatan berada di tiga tempat: Pagaralam, Karang Dalo, dan Palembang (Ibu Kota Sumatera Selatan). Ketiganya didirikan oleh Brigade Gabungan (Mixed Brigade) Tentara Angkatan Darat ke-26 yang bermarkas di Lahat. Siswa peserta berasal dari lima keresidenan yang terdapat di Sumatera bagian selatan: Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka-Belitung. Pembukaan pusat pelatihan *Gyugun* sekitar bulan Oktober-November 1943 (Zed, 2005).

Dalam memenuhi pendidikan militer, Jepang membentuk pelatihan militer di Sumatera Selatan yaitu *Gyugun* berpusat di Pagar Alam dipimpin oleh Kapten Kawaida di

bawah kendali tentara ke-25 Jepang yang menguasai Pulau Sumatera. *Gyugun* ialah satuan militer tentara sukarela dari rakyat pribumi yang dibentuk Jepang pada Maret 1943 dalam rangka mempertahankan wilayah kekuasaan Jepang (Tim Penyusun Sejarah Perjuangan Subkoss, 2003). Berdasarkan pada kutipan wawancara Kolonel Maludin Simbolon (1995) bercerita tentang pendidikan militer *Gyugun* menyatakan bahwa: Sekolah perwira *Gyugun* diadakan di lereng gunung Dempo, Pagaralam, Sumatera Selatan. Jumlah calon perwira *Gyugun* berjumlah sekitar 250 orang, tetapi yang lulus sesudah latihan dan praktek selama 8 bulan berkisar 50 orang. Selama pendidikan dan pelatihan, calon-calon perwira diseleksi dari 4 Karisidenan (Palembang, Bengkulu, Lampung, Djambi) terdiri dari pemuda-pemuda yang belum bekerja dengan usia rata-rata 18-30 tahun, baik yang belum menikah atau sudah menikah, bahkan sudah berprofesi sebagai Pesirah, Polisi, Guru HIS, Karyawan penyulingan minyak BPM di Plaju. Sebagai contoh, ia sendiri sebagai guru dan sudah berkeluarga yang ikut *Gyugun*, dari polisi seperti Hasan Kasim dan Abunjani yang lulus dari Sekolah Pamong Praja MOSVIA. Sehingga komposisi dari calon perwira itu sendiri bermacam-macam.

Pelatihan pendidikan militer khususnya *Gyugun* kombinasi antara semangat *Bushido* Jepang dengan nilai-nilai patriotisme Indonesia. Jepang menggembeleng prajurit *Gyugun* dengan semangat keprajuritan, baik fisik maupun mental. Mereka dilatih untuk menjadi pemberani sekaligus berdisiplin tinggi dalam tradisi *Bushido*. *Bushido* berarti “jalan pejuang” kode etik kaum

samurai Jepang yang mengutamakan keberanian dan kesediaan berkorban demi tanah air (Utami, 2013).

Pendidikan *Gyugun* berlangsung selama tiga bulan untuk calon bintara dan tamtama, sedangkan untuk tingkat perwira pendidikan dilanjutkan beberapa bulan kemudian. Waktu pelaksanaan pendidikan sangat banyak juga pengetahuan yang diperoleh oleh para siswa, antara lain mengenai ilmu perang, dan teknik penggunaan senjata, taktik bertempur, sampai tingkat pleton dan kompi, teori pertahanan, pergantian pasukan, penggunaan senjata baik laras pendek maupun laras panjang, serta kerja tentara. Penyelesaian kurikulum yang dipaksakan dan bahan pendidikan atau pelatihan yang didapatkan mengakibatkan proses belajar yang berlangsung tanpa henti, misalnya siswa yang beragama Islam terpaksa menunda tugas keagamaannya, terutama Sholat lima waktu (Tim Penyusun Sejarah Perjuangan Subkoss, 2003).

Bahan pendidikan dan latihan *Gyugun* mencakup: 1) Ilmu disiplin dan tata cara militer, ilmu persenjataan, taktik dan teknik bertempur, peraturan baris-berbaris, dan pekerjaan staf. 2) Latihan lapangan, yang meliputi latihan baris-berbaris, latihan bongkar pasang senjata dan menembak dengan senapan karaben, latihan bertempur beregu dan perorangan, latihan bela diri dengan bayonet atau sungkur (Juken Jitzu), dan praktik kerja staf di *Hombi Gyugun*.

Peraturan selama menunjukkan disiplin yang keras. Semua siswa diwajibkan bercukur rambut sampai gundul. Siswa yang melanggar peraturan dihukum dijemu di bawah panas matahari seharian penuh. Peraturan yang paling berat adalah

keharusan memberi hormat kepada serdadu-serdadu Jepang, terutama jika melewati pos-pos penjagaan (piket). Siswa diharuskan berhenti, lalu memberi hormat dengan menundukkan badan sampai 90 derajat. Jika hal itu dilanggar dan kebetulan dilihat serdadu yang sedang piket, siswa yang bersangkutan dipanggil dan ditempeleng oleh serdadu yang bertugas sebagai piket (Masykuri, 1980).

Siswa yang melanggar disiplin diberi hukuman dalam bentuk tempelengan, berdiri tegap dalam waktu yang lama, latihan lapangan yang diperberat, *sasen* (duduk bersimpuh degan gaya Jepang) selama berjam-jam, kadang-kadang dengan senjata yang diletakkan di lipatan kaki (di belakang lutut), pukulan dengan kopel oleh sesama siswa secara bergiliran, dan lari jarak jauh. Pada pagi hari berikutnya siswa dibangunkan dengan bunyi terompet dan diharuskan bersenam pagi. Setelah bersenam pagi, mandi, dan sarapan pagi, para siswa berbaris dengan teratur menuju ke suatu tempat, yang ternyata adalah pengguntingan rambut. Selama pendidikan berlangsung, terutama pada bulan pertama, para siswa dikenakan karantina. Mereka tidak diperbolehkan keluar dari kompleks pendidikan. Pengawasan terhadap siswa dilakukan oleh Komandan Kompi dan Komandan Pleton tentara Jepang (Tim Penyusun Sejarah Perjuangan Subkoss, 2003).

Waktu 24 jam diisi dengan pengaturan waktu yang tegas dan jelas. Waktu tidur diselingi dengan jaga malam, olahraga, waktu latihan kemiliteran, waktu makan, waktu belajar, dan waktu istirahat diatur dengan ketat sehingga semuanya berjalan dengan lancar sampai

menjadi kebiasaan. Pada waktu makan para siswa harus duduk berhadapan dengan rapi di tempatnya masing-masing. Makanan dibagikan oleh pembagi makanan. Para siswa bertugas sebagai pembagi makanan secara bergiliran. Mereka tidak boleh makan sebelum ada komando atau aba-aba makan (Utami, 2013; Tim Penyusun Sejarah Perjuangan Subkoss, 2003).

Penggemblengan mental juga dilakukan melalui makanan sehari-hari yang diberikan. Selama 20-25 hari pertama jumlah makanan ditingkatkan sejajar dengan peningkatan jumlah latihan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Jumlah makanan yang diberikan mencapai maksimumnya, setelah mana menurun secara perlahan-lahan, sedangkan jumlah latihan terus ditingkatkan meskipun kekuatan fisik tidak lagi bertambah. Yang paling penting ialah seberapa lama seorang prajurit tertentu dapat mempertahankan kekuatan maksimal dengan makanan layak serendah mungkin. Semua latihan mental diberikan berdasarkan perangkat dan sistem nilai Jepang yang menganggap dirinya keturunan dewata (Ratuperwiranegara, 1987).

Disiplin yang sangat ketat selama mengikuti pendidikan mengakibatkan adanya anggota *Gyugun* yang melarikan diri. Namun banyak kesan khusus anggota *Gyugun* terhadap pihak Jepang selama mengikuti pendidikan di Pagaralam. Secara umum, para anggota *Gyugun* mengagumi militer Jepang karena dengan postur tubuh yang kecil-kecil, tentara Jepang dapat mengalahkan tentara Belanda, yang tubuhnya lebih tinggi dan besar. Tentara Jepang memiliki keberanian, disiplin kuat, dan kemauan bekerja keras. Sebaliknya, ada pula kesan negatif,

yaitu bahwa tentara Jepang cenderung merendahkan orang Indonesia dengan bertindak sangat kasar antara lain, dengan menampar, memukul dan mencaci maki. Namun Pendidikan kemiliteran yang diadakan Jepang itu diikuti dengan penuh semangat oleh pemuda-pemuda Indonesia. Mereka berkeyakinan jika suatu saat bangsa Indonesia akan dapat merebut dan mempertahankan kemerdekaannya dengan kekuatan militer (Tim Penyusun Sejarah Perjuangan Subkoss, 2003).

Kehidupan militer memang penuh dengan kekerasan, baik secara fisik maupun mental. Kengerian dari kehidupan tentara, apalagi dalam suasana perang, sangat mempengaruhi watak mereka. *Gyugun* digembleng dengan semangat militer dan menerapkan aturan yang sama dengan tentara-tentara Jepang, semua kelompok pemuda di dalam militerisasi Jepang intinya berada di bawah pengaruh propaganda kaum pergerakan yang bercorak ke Indonesian. Kombinasi antara militer dan politik, ditambah prestasi pribadi yang pernah diraih, membuat perwira-perwira gemblengan militer Jepang dapat menjadikan diri sebagai agen-agen utama dalam roda perjuangan bersenjata pada awal Proklamasi Kemerdekaan.

Kekalahan Jepang dan menyerahnya pada sekutu diikuti dengan perintah agar Jepang mempertahankan status quo, tidak akan merubah pemerintahan dan sebagainya. Kekuatan persenjataan yang dimiliki harus diserahkan kepada sekutu. Pimpinan tertinggi Jepang mengambil langkah membubarkan *Gyugun* serta melucuti semua persenjataannya. Panglima tentara ke 16 dan ke 25 segera bertindak sesuai dengan arahan

atasannya. Dimulai tanggal 20 Agustus 1945 tentara ke 25 menyatakan pembubaran tentara *Gyugun* sesuai dengan ketentuan yang ada. Pembubaran *Gyugun* semua kesatuan diadakan dan diapelkan tanpa persenjataan. Setelah semuanya diberitahu bahwa Jepang menyerah kalah. Sehubungan dengan itu semua anggota pasukan *Gyugun* dipersilahkan pulang kampung masing-masing dengan mendapatkan pesangon seperlunya.

Pasukan tentara Jepang mengambil senjata-senjata *Gyugun* yang dikumpulkan serta membawanya pergi dengan truk yang sudah disiapkan. Anggota *Gyugun* menyadari kekurangan mereka tidak waspada, masih bodoh dan kurang pengalaman. Senjata sebagai modal untuk perjuangan bersenjata telah disia-siakan begitu saja, padahal sangat diperlukan untuk menghadapi Belanda yang pasti ingin menjajah Indonesia kembali sesudah Jepang menyerah. Memang *Gyugun* telah kehilangan senjata, namun masih ada senjata lainnya yang tidak hilang, yaitu senjata yang berupa semangat juang dan jiwa patriotisme.

Indonesia yang baru merdeka, belum mempunyai tentara. Saat itu baru dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang diharapkan akan mampu memelihara keamanan sementara waktu sambil menunggu terbentuknya tentara yang resmi. Di setiap daerah dibentuk BKR yang sebagian besar anggotanya berasal dari bekas *Gyugun* ditambah pemuda-pemuda yang bersemangat membela tanah airnya.

Dalam Ratuperwiranegara (1987), Presiden RI dalam pidatonya pada tanggal 23 Agustus 1945 dalam rangka pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) itu antara

lain: Karena itu saya mengharap kepada kamu sekalian hai prajurit-prajurit bekas Peta, Heiho, dan Pelaut beserta pemuda-pemuda lain untuk sementara waktu masuklah dan bekerjalah dalam Badan Keamanan Rakyat. Percayalah, nanti akan datang saatnya kamu dipanggil untuk menjadi prajurit dalam tentara kebangsaan Indonesia.

Bekas *Gyugun* sebagai tulang punggung Badan Keamanan Rakyat (BKR) tidak ragu-ragu lagi bersama rakyat dalam bidang bersenjata. Mereka telah mempunyai keterampilan dan kemampuan melancarkan suatu perjuangan bersenjata. Hanya saja untuk melakukan perjuangan haruslah mempunyai senjata dan itu tidak dipunyai. Dengan semangat perjuangan rakyat Indonesia dipelopori bekas *Gyugun* menuntut agar pihak Jepang menyerahkan senjata kepada pihak Indonesia, karena senjata juga sudah digunakan lagi. maka terjadilah insiden-insiden perebutan senjata antara militer Jepang dengan pemuda bekas *Gyugun*.

Di Sumatera sebagian besar satuan-satuan Jepang tidak menyerahkan begitu saja persenjataannya. Mereka lebih berperang pada perintah atasannya yang melarang menyerahkan persenjataan kepada pihak Indonesia. Di Sumatera Selatan terjadi insiden berupa pemberontakan dan antara para pemuda yang dipelopori bekas *Gyugun* dengan pihak Jepang. Pertempuran yang cukup hebat terjadi di Pagaralam, yang membawa hasil memuaskan, antara lain tentara Jepang dibuat lari tunggang langgang dan beberapa senapan mesin dapat direbut. Pertempuran lainnya berlangsung di Sekayu yang dipimpin

oleh Usman Bakar. Dalam perebutan senjata ini, pihak pemuda berhasil merampas 7 pucuk senapan. Sedangkan di Muara Dua, para pemuda yang dipimpin seorang bekas anggota *Gyugun* bernama Hasbullah Bakri berhasil mencegat konvoi Jepang dan merampas 6 pucuk senapan. Di daerah Lampung juga terjadi di Telukbetung, dimana para pemuda merampas 4 pucuk karaben dari markas Kavaleri dan beberapa pucuk senapan dari kantor polisi Jepang (Ratuperwiranegara, 1987).

Setelah *Gyugun* dibubarkan pada tanggal 22 Agustus 1945, Hasan Kasim perwira *Gyugun* Pagaralam angkatan pertama (1944) yang pernah bertugas di lapangan udara Karang Endah, dekat Lahat. Hasan Kasim mengambil prakarsa berangkat ke Palembang untuk memberikan laporan kepada AK Gani. Kemudian AK Gani memerintahkan Hasan Kasim untuk mengumpulkan teman-temannya sesama bekas *Gyugun* yang berada di kota Palembang. Setelah itu, Hasan Kasim diberi kuasa untuk membentuk Badan Penjaga Keamanan Rakyat (BPKR). Hasan Kasim diangkat sebagai ketua. Badan Penjaga Keamanan Rakyat diresmikan pada bulan September 1945 (Zed, 2005; Said, 1992).

Dengan semangat menyala-nyala para pemuda dipelopori bekas *Gyugun* bergerak menuju kantor *Water Leiden* (Kantor Walikota Palembang) yang waktu itu menjadi pusat pemerintahan Jepang di Sumatera Selatan. Para pemuda mengibarkan bendera Merah Putih pada keempat tiang di atas gedung. Pengibaran bendera Merah Putih dilakukan oleh perwira *Gyugun*: Hasan Kasim, Moh. Arif, Dani Effendi, Rd. Abdullah, dan Rivai. Tokoh-tokoh *Gyugun* yang

memegang peranan penting dalam membentuk Badan Penjaga Keamanan Rakyat (BPKR) Palembang antara lain Hasan Kasim, Rivai, Zainal Abidin Ning, Muh. Nuh, P. Hutagalung, Moh. Arif, dan Effendi serta dibantu para bekas Heiho dan Kaigun. Markas besar BPKR yang diresmikan di Palembang terletak di Gedung Sekolah Mizuho Gakka-en di Talang Semut yang kemudian dipindahkan ke gedung Methodis di jalan Tengkuruk. Badan Penjaga Keamanan Rakyat (BPKR) daerah Palembang meliputi BPKR Tanjung Raya-Kayu Agung, Prabumulih, Lahat, Lubuk Linggau, Martapura, Sekayu, Rawas, Tebing Tinggi, Muara Dua, Muara Enim, Pagaralam, dan Batu Raja (Ratuperwiranegara, 1987).

BPKR yang telah terbentuk di daerah-daerah, dengan mudah dapat membentuk pasukan di daerahnya masing-masing. Permasalahannya adalah bagaimana mempersenjatai pasukan-pasukan yang telah dibentuk. Jalan satu-satunya ialah merampas senjata dari tangan Jepang, dan sekaligus menyingkirkan Jepang dalam rangka perebutan kekuasaan. Akibatnya terjadi pertempuran-pertempuran di beberapa tempat, antara lain: di Ogan Komering Ilir, di Pagaralam, di Keresidenan Bengkulu, di Daerah Sekayu, di Teluk Betung Lampung, di daerah Ranau dan Muara Dua, di Palembang, di Way Tuba, Baturaja, Prabumulih, Lubuk Linggau, Talang Padang dan tempat-tempat lainnya (Tim Penyusun Sejarah Perjuangan Subkoss).

Gyugun tersebut merupakan pusat pendidikan militer pertama yang ada di Sumatera Selatan. Dengan adanya *Gyugun* tersebut maka masyarakat Sumatera Selatan mendapatkan pengalaman dalam

bidang kemiliteran. Pendidikan militer yang diberikan oleh Jepang tersebut telah membentuk watak para prajurit Sumatera Selatan menjadi disiplin dan pantang menyerah. Kemudian karakter tersebut dijadikan sebagai modal bagi kemiliteran di Sumatera Selatan dalam membentuk suatu Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR Sumatera Selatan diberi nama Badan Penjaga Keamanan Rakyat (BPKR) guna untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 13 November 1945 BPKR berubah menjadi BKR. Hal ini sesuai dengan struktur organisasi personil yang diterapkan pemerintah yaitu sebagai berikut: pimpinan umum Hasan Kasim, wakil pimpinan umum Moh. Rifai, keamanan Rifai, organisasi perlengkapan P. Hutagalung, persenjataan Dani Effendi, Rd. Abdullah, diklat Bambang Utoyo, asisten pendidikan Nefa Hanafiah, kepala Intel Saranggi, dan staf Intel Rasyad Nawawi, Hasyim, dan Faisal. Pada tanggal 12 Oktober 1945 Badan Keamanan Rakyat (BKR) di Palembang diresmikan menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Reorganisasi militer dan perintah dari atas memang telah dijalankan pada tahun-tahun pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan sesuai dengan kapasitas masing-masing, namun dualisme kekuatan bersenjata antara tentara reguler dan laskar masih tetap hadir (Zed, 2005).

Badan Penjaga Keamanan Rakyat (BPKR) diresmikan berdirinya pada bulan September 1945, kemudian berproses dan berkembang menjadi Badan Keamanan Rakyat (BKR), pada pertengahan tahun 1945 berproses menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat), kemudian pada

pertengahan tahun 1946 TKR disempurnakan menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia), dan akhirnya pada tanggal 3 Juni 1947 keluarlah penetapan tentang peresmian TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari Presiden Republik Indonesia (Zed, 2004; Ratuperwiranegara, 1987).

Demikianlah proses pembentukan BKR di Sumatera Selatan sampai proses pembentukan tentara di Indonesia sampai saat berdirinya TNI, bekas anggota *Gyugun* telah mengambil peranan besar dalam hal pengorganisasian tentara. Ini menjadi indikator bahwa bekas perwira *Gyugun* benar-benar potensial dan mampu mengorganisir kesatuan militer atau tentara. Peranan bekas anggota *Gyugun* sejak proklamasi sampai terbentuknya TNI bukan hanya dalam pengorganisasian saja, tetapi juga pada bidang lain yang penting, yaitu bidang pertempuran. Bekas anggota atau perwira *Gyugun* tampil di barisan depan dengan memimpin jalannya pertempuran. Ratuperwiranegara (1987)

Contohnya di Sumatera Selatan bekas anggota *Gyugun* ikut andil dalam pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang, seperti Alamsyah, Asnawi, Nuh Macan, Bambang Utoyo yang ikut memimpin pertempuran. Begitu juga selama perang kemerdekaan, para bekas anggota *Gyugun* gigih menahan serangan agresi militer Belanda I tahun 1947. Belanda melancarkan serangan Agresi Militer Belanda I serentak di pulau Jawa dan Sumatera pada tanggal 21 Juli 1947. Ini menunjukkan betapa besar peranan bekas *Gyugun* di dalam usaha mempertahankan proklamasi kemerdekaan.

SIMPULAN

Unsur kemiliteran Jepang yang diterapkan dalam *Gyugun* di Sumatera tahun 1942-1947 merupakan tradisi yang dijunjung tinggi oleh Jepang secara turun-temurun. Sejak dibentuknya pusat pelatihan *Gyugun*, para perwira *Gyugun* diberikan doktrin dan latihan dengan model militer Jepang yang bersifat keras dalam segi fisik maupun mental. Tentara yang masuk menjadi anggota *Gyugun* berasal dari orang-orang Sumatera Selatan yang sebelumnya belum pernah memiliki pengalaman militer. Pemuda Sumatera Selatan di doktrin dan dilatih oleh Jepang berdasarkan budaya karakter militer yang mereka miliki (*Bushido*). Semangat *Bushido* yang bersifat keras diberikan kepada prajurit *Gyugun* bertujuan untuk membentuk watak prajurit *Gyugun* yang pemberani, pantang menyerah, cinta tanah air dan memiliki disiplin tinggi seperti yang dimiliki oleh prajurit Jepang. Seorang prajurit *Gyugun* harus selalu waspada dan siap bertempur, sehingga para prajuritnya dilatih untuk dapat menggunakan berbagai senjata. Indoktrinasi yang diberikan kepada prajurit *Gyugun* tersebut pada akhirnya memiliki semangat tempur yang tinggi, terampil dalam bidang kemiliteran, kepercayaan yang tinggi, disiplin tinggi dan memiliki rasa tanggung jawab.

Dampak dari semangat *Gyugun* di Sumatera tahun 1942-1947 dalam pembentukan BKR tahun 1945-1947 terlihat dari kehidupan militernya. BKR merupakan organisasi militer yang dibentuk sendiri oleh pemuda Indonesia. Prajuritnya berasal dari mantan opsir *Gyugun*. Peranan bekas *Gyugun* sampai terbentuknya BKR bukan hanya dalam bidang pengorganisasian tentara saja, tetapi

juga pada bidang lain yang lebih penting, yaitu bidang pertempuran. Di dalam setiap medan pertempuran, bekas anggota *Gyugun* tampil di barisan depan dengan memimpin jalannya pertempuran. Disiplin yang tinggi, kemauan bekerja keras, ulet serta tidak mengenal menyerah telah dipunyai setelah sejak awal mula mengenal dunia militer. BKR masih bersifat dualistis, karena merupakan organisasi campuran yang terdiri dari bermacam-macam organisasi militer (kelaskaran) serta organisasi pemuda yang bukan militer. Tetapi para pemimpin BKR yang merupakan mantan prajurit *Gyugun* tersebut berusaha untuk mengajarkan kepada anggotanya mengenai penyerangan pasukan secara gerilya, dan juga menanamkan semangat yang tinggi dalam membela negara, sehingga semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi telah menjadi watak dan karakter pemuda Indonesia hingga mencapai kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. (2011). *Metode Penelitian Sejarah Islam*. Penerbit Ombak. Yogyakarta
- Ali, M. (1985). *Penelitian Kependidikan: Prosedur dan Strategi*. Angkasa. Bandung
- Arikunto, S. (1989). *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Arsip Wawancara Kolonel Maludin Simbolon yang diwawancarai tahun 1995. Koleksi dari Museum Perjuangan Subkoss Garuda Sriwijaya.
- Azwar, S. (2007). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Bakrie, C. R. (2007). *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta

- Basri, M., Desiyana, L., Syah, I. (2017). *Upaya Pemerintah Militer Jepang Membentuk Karakter Militansi Pejuang Bangsa Indonesia Tahun 1942-1945*. FKIP UNILA: Bandar Lampung. <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/1123>
- Basri, M., Febriyani, C. P., Imron, A. (2017). *Pemerintahan Pendudukan Militer Jepang di Kotaagung Tahun 1942-1945*. FKIP Unila: Bandar Lampung. <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/14496>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1991). *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Cipta Adi Pustaka. Jakarta
- Desmita, D. (2014). *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Fattah, A. (2005). *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*. LKIS. Yogyakarta
- Gadjahnata, G. (2000). *Sejarah Teknik Minyak Plaju 1942-1945 Kepeloporan Semangat Juang-1945*. Penerbit UNSRI. Palembang
- Hanafiah, D. (1998). *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang*. Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang. Palembang
- Herlina, N. (2020). *Metode Sejarah: Edisi Revisi 2020*. Satya Historika. Bandung
- Herlina, N. (2008). *Metode Sejarah*. Satya Historika. Bandung
- Irwanto, D., & Alian, S. (2014). *Metodologi dan Historiografi Sejarah*. Eja Publisher. Yogyakarta
- Juliana, J., Ibrahim, B., & Bunari, B. (2021). *Peranan Abdur Rahim Damrah dalam Melawan Penjajahan Jepang di Kabupaten Bengkulu Selatan (1943-1945)*. SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah. 4(1). 41-50. <https://doi.org/10.31540/sindang.v4i1.1357>
- KKBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). (2005). PT (Persero) Penerbitan dan Percetakan. Jakarta
- Kuntowijoyo, K. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana. Yogyakarta
- Kurasawa, K. (1993). *Mobilisasi dan Kontrol: Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Lebra, J. C. (1998). *Tentara Gemblengan Jepang*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Mita, A. (2019). *Palembang Shi pada Masa Pemerintahan Militer Jepang Tahun 1942-1945*. Lembaran Sejarah. 15(2). 103-120. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.59530>
- Muhaimin, Y. A. (1982). *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia Tahun 1945-1966*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Nasution, A. H (1977). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 1: Proklamasi*. Disjarah AD dan Angkasa. Bandung
- Nawawi, H. (1993). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Nazir, M. (2005). *Metodelogi Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta

- Notosusanto, N. (1979). *Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka. Jakarta
- Pahlevi, M. R., Yusuf, S., & Alian, A. (2020). *Peran Kabupaten Lahat dalam Revolusi Fisik di Sumatera Selatan Tahun 1947-1949*. *Journal of Indonesian History* 9(2). 167-177. <https://doi.org/10.15294/jih.v9i2.46967>
- Poerwadarminta, W. J. S. (1988). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta
- Ratuperwiranegara, H. M. (1987). *Ex PETA dan Gyu Gun Cikal Bakal TNI*. YAPETA. Jakarta
- Rosidi, A. (1981). *Mengenai Jepang*. Pusat Kebudayaan Jepang Jakarta (The Japan Foundation). Jakarta
- Said, A.H. (1992). *Bumi Sriwijaya Bersimbah Darah*. PT Mampang Indah Pratama, Yayasan Krama Yudha. Jakarta
- Santosa, I. (1996). *Kolonel Mauludin Simbolon Lika-liku Perjuangan dalam Pembangunan Bangsa*. Yayasan Bina Bangsa Indonesia. Jakarta
- Santosa, I. (2005). *Tarakan Pearl Harbor Indonesia 1942-1945*. Primamedia Pustaka. Jakarta
- Sari, E. K., Syah I., & M, S. (2019). *Kontribusi Eks-Giyûgun dalam Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) di Lampung Tahun 1945*. FKIP Unila: Bandar Lampung
- Sulasman, S. (2014). *Metode Penelitian Sejarah, Teori, Metode, Contoh Aplikasi*. Pustaka Setia. Bandung
- Surakhmad, S. (2012). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Tarsito. Bandung
- Tim Penyusun Sejarah Perjuangan Sub Komandemen Sumatera Selatan. (2003). *Sejarah dan Peranan SUBKOSS Dalam Perjuangan Rakyat Sumbagsel 1945-1950*. Dewan Harian Daerah. Palembang
- Trianto, J. R. (2021). *Mobilisasi Bangsa Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang untuk Kepentingan Perang Asia Timur Raya Tahun 1942-1945*. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*. 17(1). <https://doi.org/10.21831/istoria.v17i1.39186>
- Utami, I. (2013). *Pengaruh Unsur Karakter Kemiliteran Jepang Terhadap Giyugun Di Sumatera Tahun 1942-1945 dan Dampaknya Terhadap Pembentukan BKR/TKR Tahun 1945-1950*. Skripsi: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Wiranata, P., Safitri, S., Sair, A. (2018). *Perkembangan Pendidikan di Palembang pada Tahun 1942-1950 (Sumbangan Materi Pembelajaran Mata Kuliah Sejarah Pendidikan)*. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*. 7(1). <https://doi.org/10.36706/jc.v7i1.5302>
- Zed, M. (2004). " *Giyugun: Tentara Sumatera Gemblengan Jepang, 1942-1945*". *Jurnal Pendidikan Sejarah*. 5(10). 43-76.
- Zed, M. (2005). *Giyugun, Cikal-Bakal Tentara Nasional di Sumatera*. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta